

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Thailand merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tak pernah dijajah. dengan luas wilayah mencapai 510.000 kilometer persegi. Muangthai atau Thailand disebut juga Negeri Gajah Putih. Muangthai diambil dari nama salah satu suku bangsa di sana, yaitu suku Thai artinya Negara Dahulu orang Eropa menyebut Negara ini Siam. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan berkonstitusi, tetapi pemerintahan sehari-hari dikendalikan oleh seorang perdana menteri.

Thailand memiliki Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional Kendati Monarki Konstitusional, Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 - 2006, Thailand sekurangnya punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932, hari konstitusi Thailand.

Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada Dewan Negara Thailand, beranggota 18 orang yang diangkat Monark, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan Monark. Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh Monark tetapi bertanggung jawab kepada Rathasapha.

Thailand menganut Sistem pemerintahan: Parlemerter Monark sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan.

Parlemen: Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/House of Representatives Wuthisapha/Senate). Sapha Phuthaen Ratsadon dan Wuthisapha merupakan unsur parlemen Thailand (Rathasapha) Sapha Phuthaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 100 orang dipilih lewat sistem proporsional dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-The-Post (dari parpol). Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari antara anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama Wuthisapha memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian internasional.

Politik Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis , dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara . peradilan independen dari eksekutif dan legislatif.

Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama. Sebagai Kepala Negara, Raja melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen: kekuasaan eksekutifnya melalui cabinet: kekuasaan yudisial melalui pengadilan. Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas nama kebaikan rakyat.

Badan legislatif Thailand adalah bikameral.500 anggota legislatifnya (anggota parlemen) dipilih secara populer. Menduduki jabatan selama 4 tahun.400 anggota berasal dari daerah (dipilih langsung oleh konstituennya; masing-masing mewakili sekitar 150.000 orang) 100 anggota berasal dari partai (dipilih secara tdk langsung oleh persentase suara yang diterima partai).Senat terdiri dari 200 kursi.

Senator Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2000 (sblmnya diangkat oleh Raja atas rekomendasi Dewan Menteri). Menduduki jabatan selama 6 tahun. Lembaga eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri (sejak amandemen konstitusi 1992 harus anggota parlemen).Kabinet bertanggungjawab atas administrasi 14 kementerian, dan Kantor Perdana Menteri.

Konstitusi adalah Memegang peranan tertinggi negara yang menetapkan kekuasaan, fungsi dan tugas serta struktur Eksekutif, Legislatif dan Kehakiman. Konstitusi sekarang dari Thailand, yaitu Konstitusi Kerajaan Thailand, BE 2540 (1997) memiliki dampak besar pada reorganisasi sistem politik serta sistem peradilan di Thailand . Jenis-jenis pengadilan diakui di bawah Konstitusi 1997 adalah: Mahkamah Konstitusi, Pengadilan, Pengadilan Administrasi dan Pengadilan Militer.

Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata baru-baru ini didirikan sebagai hasil dari ketentuan konstitusi tersebut. Meskipun perubahan ini mengurangi lingkup yurisdiksi Pengadilan Kehakiman, sebagian besar kasus termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Kehakiman.

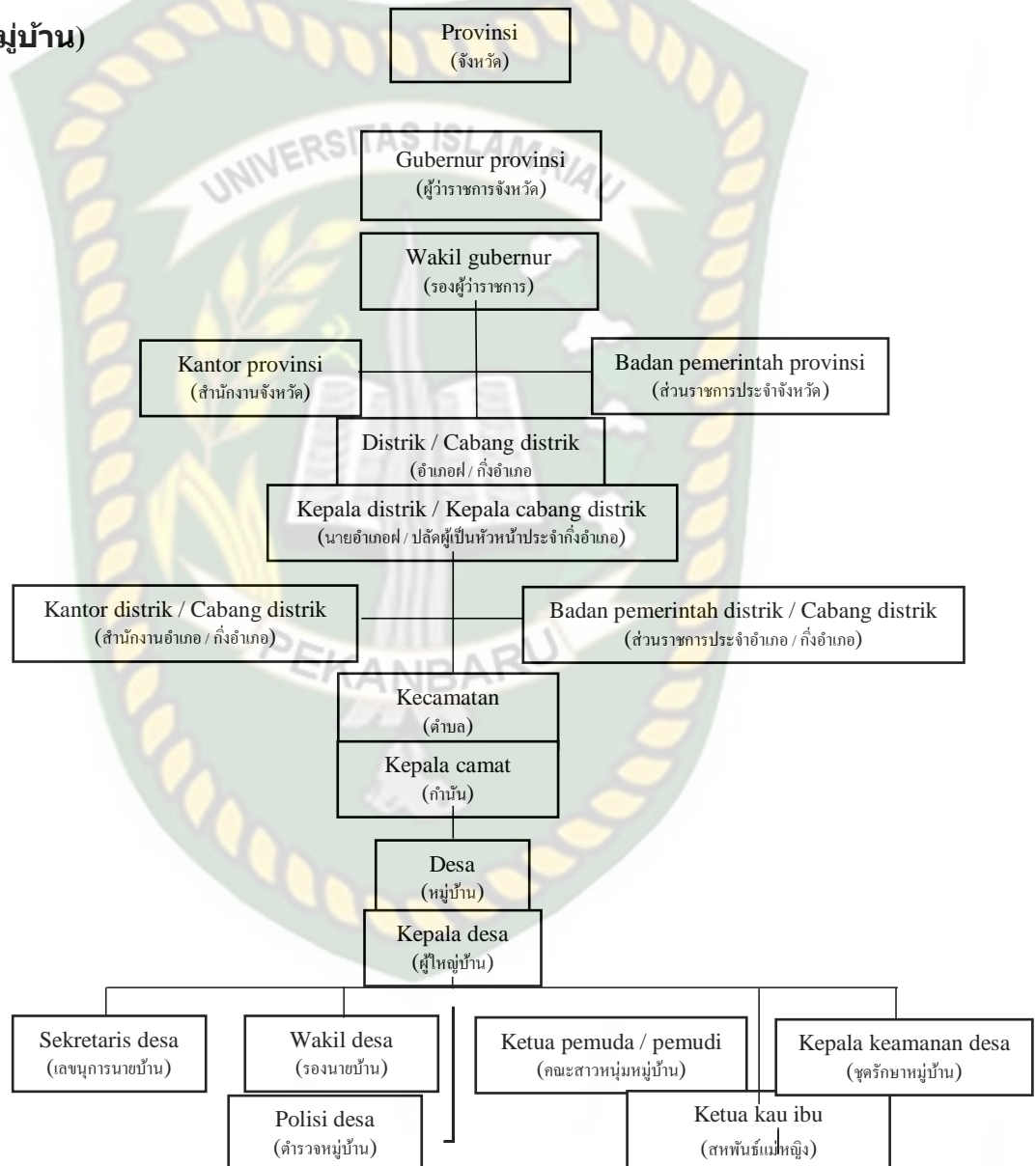
Thailand dibagi kepada 76 provinsi (bahasa Thailand: จังหวัด, changwat), yang kemudian dibagi kepada 5 kelompok provinsi - kadang Timur

dan Tengah digabung menjadi satu. Nama setiap provinsi sama dengan ibukotanya, yang kadang diawali dengan kata Mueang (atau Muang) untuk mencegah kebingungan dengan provinsinya. Kecuali Songkhla, ibukotanya juga sekaligus merupakan kota terbesar di provinsinya.

Bangkok adalah provinsi dengan populasi terbesar dan kepadatan penduduk terbesar. Provinsi terbesar menurut wilayah adalah Nakhon Ratchasima, yang terkecil adalah Samut Songkhram. Mae Hong Son mempunyai kepadatan penduduk terkecil, sementara Ranong mempunyai populasi terkecil (semua angka menurut sensus 2000).

Setiap provinsi diperintah oleh seorang gubernur yang dilantik Menteri Dalam Negeri. Pengecualian berlaku terhadap Bangkok di mana sang gubernur dipilih melalui pemilu. Provinsi-provinsi tersebut dibagi lagi menjadi 796 distrik (amphoe, อำเภอ) dan 80 distrik kecil (king amphoe, กิ่งอำเภอ). 50 distrik Bangkok dipanggil khet (เขต), namun bahkan dalam dokumen resmi kadangkala salah disebut sebagai amphoe. Jumlah distrik di provinsi berbeda satu sama lainnya, dari tiga di provinsi kecil hingga 50 di Bangkok. Sistem pembagian lebih ke bawah lagi adalah tambon (komunitas atau sub-distrik) dan mubaan (desa).

**Gambar I. : Struktur Pemerintah provinsi Kabupaten, kecamatankabupaten dan mubaan (โครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัด อำเภอกิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน)**



*Sumber : <http://job.nau.or.th/omkoi/general/law001.html>*

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus

ditingkatkan pengetahuannya dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di kampung, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instansi-instansi vertikal di daerah, maupun pemerintah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh Wilayah Negara Thailand. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparaturnya pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan

upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di kampung pokcikting (Thailand selatan) dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh pemerintah kampung pokcikting Thailand selatan berupa penyediaan bantuan yang menunjang kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam program pelaksanaan pembangunan. Pemberian kreatifitas, dan motivasi bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain perhatian di harapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil, hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang di butuhkan dan dirasakan oleh mereka. Demikian pula halnya dengan pembangunan di kampung pokcikting (Thailand Selatan), nampaknya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama

pembangunan sarana-sarana umum seperti jalan, jembatan, pos kamling, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sebagainya.

**Tabel I.1 Kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.**

No.	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1.	Pembangunan Sarana Pendidikan Agama (Tadika)	Sudah di laksanakan
2.	Pendidikan SD (Praktom)	Sudah di laksanakan
3.	Pembangunan Masjid/Mushalla	Sudah di laksanakan
4.	Pembangunan sarana transportasi	Sudah di laksanakan
5.	Penerangan Jalan	Sudah di laksanakan
6.	Pembangunan Gedung Desa (muban)	Sudah di laksanakan

**Tabel I.2 : Kegiatan pembangunan yang belum dilaksanakan.**

No.	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1.	Pembanguna Siskamling (pomcorobo)	belum di laksanakan
2.	Pembangunan gedung pertemuan (ti prakcum)	belum di laksanakan



Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di bermukakakan fenomena sebagai berikut :

1. Ada Indikatur pemerintah desa tidak melakukan sosialisasi kegiatan pelaksanaan di desa.
2. Masyarakat cenderung tidak peduli dengan kegiatan pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah kampung.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Model Pemerintah Muban Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Muban Pokcikting Kabupaten Sungaipadi Thailand Selatan.”**

#### **A. Rumusan Masalah**

Arikunto (2005:14) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus mana memulai, ke mana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Peranan Pemerintah Kampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Kampung pokcikting Thailand Selatan.”**

## **B. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan diteliti tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

- 1) Untuk mengetahui Model Pemerintah Muban Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Muban Pokcikting Thailand Selatan.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Muban pokcikting Thailand selatan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sebagai bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melangkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah kampong pokcikting Thailand selatan dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang, khususnya pada pembangunan di Muban pokcikting Thailand selatan.

- 3) Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau